

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap tahun perekonomian di Indonesia selalu mengalami perubahan, baik dari sektor ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah tengah gencar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam sektor ekonomi. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus kearah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat tercapai melalui penekanan pada pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam pasal 33 UUD 1945 diketahui bahwa di negara kita ini terdapat 3 pelaku ekonomi yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian perlu disejajarkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau penyangga utama perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama atau sebagai tulang punggung dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannyapun diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan 2 sarana

peningkatan kemajuan ekonomi, bagi anggota khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur dan berkeadilan, berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 Bab XIV Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa, **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**.

Untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Koperasi bisa menjadi tumpuan utama dalam membangun perekonomian, karena Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan arti Koperasi merupakan,

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pembinaan terhadap Koperasi harus terus-menerus dilakukan dan terarah, agar Koperasi tersebut dapat menerapkan prinsip-prinsip secara nyata dan benar, sehingga Koperasi dapat sejajar dengan badan usaha lainnya.

Salah satu tugas Koperasi adalah meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga anggotanya dengan cara memberikan pelayanan yang nyata sesuai dengan kebutuhan anggota. Anggota akan memberikan keputusan untuk memasuki

dan memelihara serta mempertahankan hubungannya dengan Koperasi dan akan berkontribusi secara aktif, jika seluruh intensif atau manfaat yang diterima lebih besar atau setidaknya setara dengan kontribusi yang diberikan. Dengan demikian Koperasi harus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada anggota Koperasinya, dengan memberikan pelayanan yang baik maka anggota Koperasi akan merasa nyaman dan dekat dengan Koperasi.

Dalam memenuhi kebutuhan anggota, Koperasi tentunya memiliki pesaing yang menawarkan produk atau yang dibutuhkan yang sama kepada anggota. Oleh karena itu Koperasi harus mampu bersaing dengan perusahaan non Koperasi supaya anggota tetap berpartisipasi di Koperasinya.

Salah satu Koperasi yang masih berdiri hari ini adalah Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB). Koperasi yang berbadan hukum PAD.518/PAD.02-DISKOP/2005 Tanggal. 14 Februari 2005 yang berlokasi di Jl. Wastukencana Blok No.5, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat 40117 yang didirikan pada tanggal 24 November 1997 dengan tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan Pegawai Kota Bandung dengan jumlah anggota per tahun 2022 sebanyak 5.040

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung memiliki 3 unit usaha yaitu:

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Niaga
3. Unit Pusat

Dari 3 unit tersebut yang merupakan Unit yang memenuhi kebutuhan Anggotanya dari bidang Konsumsi adalah Unit Niaga. Tentunya dalam melakukan kegiatan usahanya Unit Niaga tidak menjadi pelaku tunggal dibidangnya, ada banyak sekali pelaku usaha yang menjual produk yang serupa. Meskipun Unit Niaga sudah melakukan beberapa cara seperti melakukan Delivery pesanan ke tempat/ruangan tempat anggota bekerja namun hal ini tidak akan sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan minat beli anggota di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

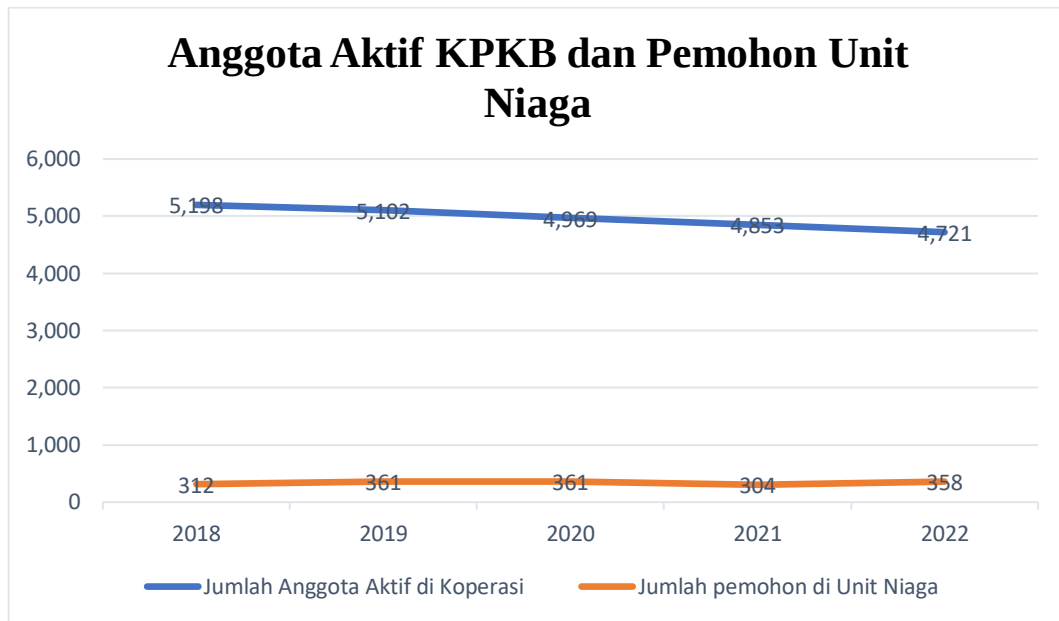
Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Unit Niaga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, berikut ringkasan mengenai Anggota Aktif Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dan Anggota aktif di Unit Niaga:

Tabel 1.1
Gambaran Perbandingan Anggota Aktif di Koperasi, Unit Niaga dan Jumlah Pelayanan

Tahun	Jumlah Anggota Aktif di Koperasi	Jumlah pemohon di Unit Niaga	Jumlah Pelayanan (Rp)	Jumlah Realisasi Keuntungan (Rp)
2018	5.198	312	2.200.885.459	454.579.602
2019	5.102	361	2.613.288.264	498.952.105
2020	4.969	361	2.443.424.354	377.828.760
2021	4.853	304	2.658.713.344	459.993.876
2022	4.721	358	1.924.121.397	523.892.468

Sumber : RAT Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022, diolah

Berdasarkan table di atas menunjukkan untuk jumlah anggota aktif di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan setiap tahunnya, adapun penurunan yang paling banyak ada di tahun 2020 sebanyak 133 orang, lebih jelasnya bisa dilihat dari *Chart* dibawah:



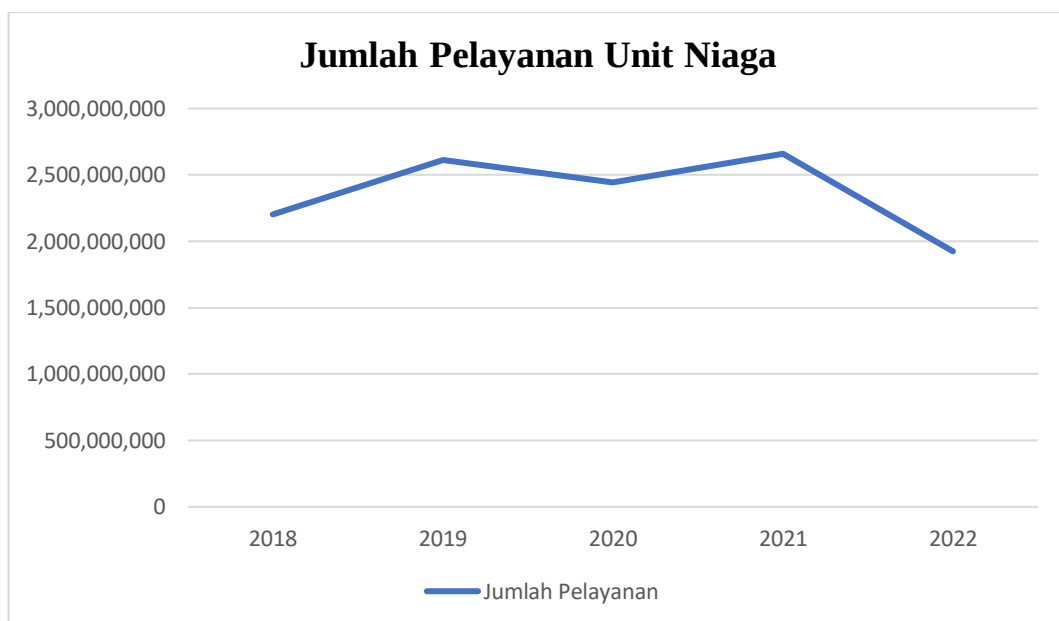
Gambar 1.1
Grafik Anggota Aktif KPKB dan Pemohon Unit Niaga

Untuk jumlah pemohon di Unit Niaga dari tahun 2018 – 2020 dari 312 menjadi 361, namun tahun 2021 kembali mengalami penurunan jumlah pemohon di Unit Niaga sebanyak 57 anggota atau menjadi 304 pemohon, dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2022 sebanyak 54 jumlah pemohon, sehingga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan sejumlah 46 pemohon atau 1,8%.

Dilihat dari table Gambaran Perbandingan Anggota Aktif di Koperasi, Unit Niaga dan Jumlah Pelayanan untuk jumlah Anggota Aktif Koperasi tahun 2022 dengan jumlah 4.721 yang aktif bertransaksi di Unit Niaga hanya ada 358 Anggota Koperasi yang berbelanja di Unit Niaga atau hanya 14% saja yang aktif berbelanja di Unit Niaga ini. Artinya diperlukan analisis mengenai minat beli anggota terhadap Unit Niaga apakah mempunyai minat atau tidak.

Dengan sedikitnya jumlah pemohon membuktikan bahwa seluruh anggota masih kurang bisa memanfaatkan kehadiran Unit Niaga dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, hal ini harus segera diperhatikan bahkan diperbaiki agar partisipasi dari anggota Koperasi Pegawai Kota Bandung khususnya Unit Niaga dapat berkembang.

Untuk jumlah pelayanan Unit Niaga mengalami fluktuatif bahkan jika ditarik dari tahun 2018 sampai tahun 2022 jumlah pelayanan mengalami penurunan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui *Chart* dibawah:



Gambar 1.2
Jumlah Pelayanan Unit Niaga

Jumlah pelayanan di Unit Niaga juga sama fluktuatif bahkan berkurang karena anggota yang bertransaksi di Unit Niaga juga kurang bahkan menurun, hal ini harus betul dianalisis supaya Unit Niaga bisa mengoptimalkan jumlah pelayanan yang diberikan kepada anggota.

Berdasarkan dari data diatas maka dapat disimpulkan suatu permasalahan yang ada di Koperasi Pegawai Kota Bandung diantaranya :

1. Jumlah Anggota Aktif di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang turun menurun dari tahu ketahun.
2. Jumlah anggota yang bertransaksi di Unit Niaga menurun bahkan kurang.
3. Jumlah pelayanan koperasi menurun

Adapun beberapa masalah yang di temukan dalam wawancara pendahuluan Bersama salah satu karyawan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung beliau mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung di Unit Niaga yaitu: Masih adanya anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang bertransaksi di Mart/tempat yang lainnya. Dengan demikian besar harapan saya untuk melakukan penelitian ini dengan harapa bisa memajukan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung supaya bisa memperbaiki apa yang masih kurang didalam menjalankan bisnisnya.

Dengan adanya suatu permasalahan di Koperasi Pegawai Kota Bandung yang dipaparkan di atas serta didukung oleh data dan wawancara pendahuluan maka belum diketahui mengenai, “Analisis Minat Beli Anggota Secara Kredit Pada Unit Niaga Dan Kaitannya Dalam Meningkatkan Pelayanan”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah secara terperinci, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana minat beli anggota secara kredit di Unit Niaga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Cara Unit Niaga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan.
3. Bagaimana partisipasi anggota dalam meningkatkan pelayanan secara kredit Unit Niaga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan Pelayanan Koperasi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Bagaimana minat beli anggota di Unit Niaga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara Unit Niaga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan.

3. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi anggota dalam meningkatkan pelayanan secara kredit.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Kegunaan Teoritis penelitian ini adalah dapat menambah wawasan Koperasi dalam menemukan cara yang tepat dalam meningkatkan minat beli anggota di suatu Koperasi, serta diharapkan sebagai saran kemajuan Koperasi yang secara teori yang dipelajari oleh peneliti selanjutnya ataupun peneliti selanjutnya.

1.4.2. Aspek Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah dapat membantu atau menjadi bahan acuan yang berguna dalam penerapan peningkatan Pelayanan Koperasi melalui minat beli anggota bagi Koperasi, Sehingga kegunaan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat positif untuk kemajuan Koperasi.